



2022

LAPORAN TAHUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU



BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Banjarbaru merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari tugas tersebut dan sejalan dengan Visi Kota Banjarbaru yaitu: “BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)” dan Misi dari Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Visi dan Misi Kota Banjarbaru tersebut perlu diikuti dengan meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru.

Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masukan dalam peningkatan kinerja dinas;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) ; dan

9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru; dan
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
14. Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 100/0042/Pem-setda tanggal 10 Januari 2023 tentang Laporan Tahunan SKPD.

B. GAMBARAN UMUM SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

Memutuskan Peraturan Walikota tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yaitu Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2021 yang ditetapkan di Banjarbaru pada Tanggal 28 Desember 2021.

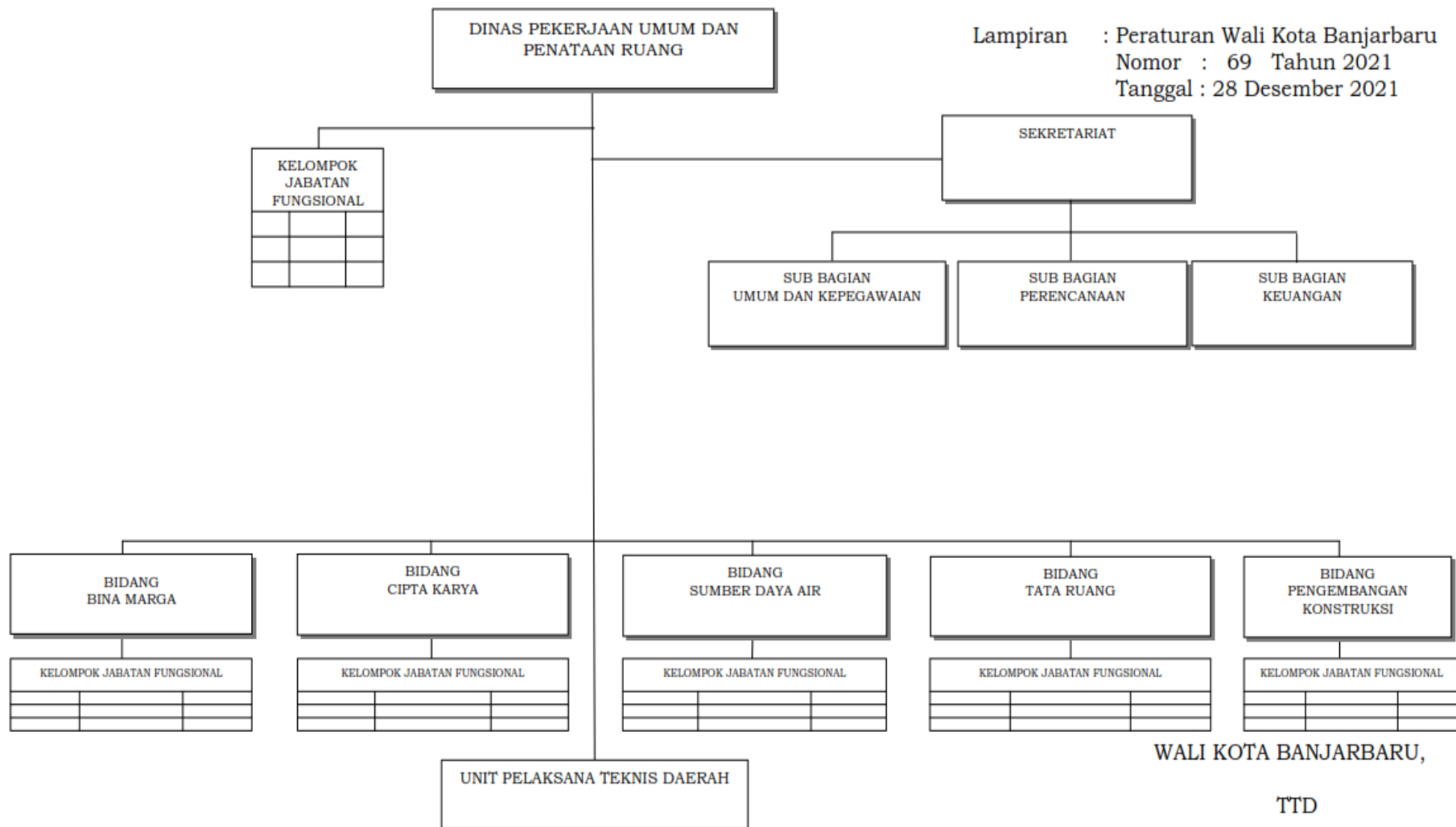
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

1.1. Keadaan Pegawai

Jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarbaru sebanyak 57 orang, terdiri dari 34 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Berdasarkan golongan ruang, PNS DPUPR sebanyak 57 orang yang terdiri dari 9 orang Golongan IV, 37 orang Golongan III dan 11 orang Golongan II (Tabel 1). Sedangkan jumlah Pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 59 orang laki-laki dan 48 orang perempuan. Pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) dengan latar belakang Pendidikan S-2 sebanyak 14 orang dan S-1 sebanyak 54 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, Diploma III sebanyak 14 orang, dan SLTA sebanyak 23 orang (Tabel 2).

Tabel. 1

**DATA PNS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
TAHUN 2022**

No.	Golongan Ruang	Jumlah Orang	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Golongan IV	9 orang	7 orang	2 orang
2	Golongan III	37 orang	22 orang	15 orang
3	Golongan II	11 orang	5 orang	6 orang
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		57 orang	34 orang	23 orang

Tabel.2

**DATA PEGAWAI (PNS DAN TENAGA KONTRAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2022**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Sarjana Strata 2 (S-2)	14 orang	8 orang	6 orang
2	Sarjana Strata 1 (S-1)	54 orang	27 orang	27 orang
3	Diploma IV	1 orang	1 orang	-
4	Diploma III	14 orang	7 orang	7 orang
5	SLTA	23 orang	16 orang	7 orang
6	SMP	-	-	-

7	SD	-	-	-
Jumlah		106 orang	59 orang	47 orang

Keadaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut yang memuat Nama dan Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru keseluruhan berdasarkan Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan dan Usia.

Tabel 3.
NAMA PEGAWAI (PNS, PTT, DAN TENAGA KONTRAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2022

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
1	Eka Yuliesda A, ST,MT 19730727 199803 2 008	Kepala Dinas	S2	Pembina Tk.I	IV/b	59
2	Abdussamad, ST, MT 19730927 199811 1 001	Sekretaris	S2	Pembina	IV/a	49
3	Nina Aprodita, ST, MT 19780410 200701 2 014	Kabid Cipta Karya	S2	Penata Tk.I	III/d	49
4	M. Adi Maulana, ST, MT 19831125 200604 1 005	Kabid Bina Marga	S2	Penata Tk.I	III/d	39
5	Subrianto, ST, MT 19710731 199303 1003	Kabid Sumber Daya Air	S2	Pembina	IV/a	51
6	Akhmad Syahidan, S.Pi, M.Ec.Dev 19721031 199703 1 003	Kabid Tata Ruang	S2	Pembina	IV/a	50
7	Sumaryono, ST, MT 19680726 199603 1 004	Kabid Pengembangan Konstruksi	S2	Pembina	IV/a	54
8	Rahmat Juliani, ST 19750701 200604 1 018	Kasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan	S1	Penata Tk.I	III/d	47
9	A. Rizani, ST 19720527 200604 1 013	Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	S1	Penata Tk.I	III/d	50
10	Rusna Apriani, ST 19770419 200701 2 009	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	S1	Penata Tk. I	III/d	45
11	Wahyuni, ST 19770418 199803 1 006	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	S1	Penata Tk. I	III/d	45
12	Benny Surya Atmaja, ST, MT 19770811 201101 1 002	Kasi Pengembangan Pras. Irigasi,Danau & Rawa	S2	Penata	III/c	45

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
13	Pieta Widhiasi, ST, MT 19811022 200604 2 012	Kasi Pengembangan Pras. Sungai dan Waduk	S2	Pembina	IV/a	41
14	Poppy Syofia Yunidar Marthiana,ST,MT 19820603 200604 2 030	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang	S2	Penata Tk. I	III/d	40
15	M. Aulia Rizhan, ST 19771025 200701 1 009	Kasi Pemanf., Pengend. Dan Evaluasi Tata Ruang	S1	Penata Tk. I	III/d	45
16	Ir. Yuliansyah, MT 19650719 199703 1 006	Kasi Peralatan & Uji Mutu	S2	Pembina	IV/a	57
17	Fathurrahmani, ST 19710929 200604 1 006	Kasi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	S1	Penata Tk.I	III/d	51
18	Erny Sukmawati, ST, MM 19760123 200003 2 004	Kasubbag Keuangan	S2	Pembina	IV/a	46
19	Alip, S.Sos 19670622 199803 1 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1	Penata Tk. I	III/d	55
20	Henny Rachmaniar, ST 19770917 200701 2 014	Kasubbag Perencanaan	S1	Penata Tk. I	III/d	45
21	Zabidi Anshari, ST, MT 19690228 199703 1 010	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Madya	S2	Pembina Utama Muda	IV/c	53
22	Iwan Noviantara, ST 19781123 201001 1 001	Fungsional Penata Ruang Muda	S1	Penata	III/c	44
23	Yuni Rosyada, A.md 19800621 201001 2 013	Fungsional Pranata Komputer	D-III	Penata Muda	III/a	42
24	Irpansyah, SST 19760708 199803 1 004	Pemelihara Jalan	D-IV	Penata Tk.I	III/d	46
25	Irwansyah Isnaini M., ST 19801110 200904 1 002	Pengawas Bangunan dan Gedung	S1	Penata	III/c	42
26	Laila Hanif, A.Md 19830416 201406 2 003	Pengawas Jaringan Utilitas	D-III	Pengatur Tk. I	II/d	39
27	Raihan 19811108 20101 1 004	Pemelihara Sarana dan Prasarana	SLTA	Pengatur Tingkat I	II/d	41
28	Dedi Hidayat, A.Md 19851222 201101 1 009	Operator Alat Berat	D-III	Penata Muda	III/a	37

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
29	Mirza Cahyadi, ST 19791223 200701 1 006	Analisis Tata Ruang	S1	Penata Tk.I	III/d	43
30	Heny Henderawati, ST 19770110 200701 2 020	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	S1	Penata Muda Tk.I	III/b	45
31	Sukirman 19660727 201212 1 001	Operator Alat Berat	SLTA	Pengatur Muda Tk.I	II/b	56
32	Indra Sumargo, SE 19730506 200901 1 003	Bendahara	S1	Penata	III/c	49
33	Kristina Endang.S,SE 19780622 201001 2 006	Penata Laporan Keuangan	S1	Penata	III/c	44
34	H.M. Nursolichi 19691225 199103 1 008	Pengelola Gaji	SLTA	Penata Muda Tk.I	III/b	53
35	Nindika Kusyaning.Rd, SE 19880228 201001 2 013	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	S1	Penata Muda	III/a	34
36	Dhermawan 19720417 200701 1 017	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur Tk. I	II/d	50
37	Fitriyani 19770914 201212 2 002	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur Muda Tk.I	II/b	45
38	Novia Tinna Wijayanti, ST 19861109 202012 2 002	Fungsional Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	36
39	Ramayanti, S. Ars 19901108 202012 2 004	Fungsional Ahli Pertama Teknik Pengairan	S1	Penata Muda	III/a	32
40	Aulia Mulyani, ST 19780222 200801 2 021	Analisis Sumber Daya Air	S1	Penata Tk.I	III/d	44
41	Diana Pratiwi, S. Ars 19930309 202012 2 005	Fungsional Ahli Pertama Teknik Pengairan	S1	Penata Muda	III/a	30
42	Andhika Yusuf Prabowo, S.Ars 19961122 202012 1 002	Fungsional Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	26
43	M. Irhash Maulana, S.Ars 19970318 202012 1 004	Fungsional Ahli Pertama Teknik Lingkungan	S1	Penata Muda	III/a	25
44	Miftahuddin, S.E 19881216 202203 1 001	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	S1	Penata Muda	III/a	34

45	Hetti Sari, S.E 19940513 202203 2 006	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	S1	Penata Muda	III/a	28
46	Wahyu Ag Saputra, S.M. 19971029 202203 1 003	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S1	Penata Muda	III/a	25
47	Isalah Salsabilla Salman, A.Md.Ak 19990807 202203 2 005	Verifikator Keuangan	D-III	Pengatur	II/c	23
48	Elma Sadina, A.Md.T 20000330 202203 2 001	Terampil Tehnik Jalan dan Jembatan	D-III	Pengatur	II/c	22
49	M. Rusydi Romadhon, S.T 19950219 202203 1 004	Pengawas Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	27
50	Amalia Maulida, A.Md.Ars 19980625 202203 2 009	Terampil Tehnik Penyehatan Lingkungan	D-III	Pengatur	II/c	24
51	Ahmad Rivani, A.Md.T 19991202 202203 1 003	Terampil Tehnik Pengairan	D-III	Pengatur	II/c	23
52	Reza Lazuardi Hafidz, S.T 19980722 202203 1 005	Analisis Sumber Daya Air	S1	Penata Muda	III/a	24
53	Rizal Fitriannor, S.T 19940315 202203 1 009	Analisis Sumber Daya Air	S1	Penata Muda	III/a	28
54	Marisa Arini, A.Md 19970307 202203 2 010	Pengelola Dokumen Perizinan	D-III	Pengatur	II/c	25
55	Nissha Hardyan Sari, S.T 19871211 202203 2 003	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S1	Penata Muda	III/a	35
56	Maria Prisila Hederanti Itu, S.T 19990711 202203 2 005	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	S1	Penata Muda	III/a	23
57	Novita Sari, S.T 19960908 202203 2 014	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	S1	Penata Muda	III/a	26
58	M. Rizal, S.ST 757 057 704	Tenaga Teknis Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	44
59	Eddy Rusmadi, ST 839 058 104	Tenaga Teknis Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	39
60	Evie Noviannor, ST 849 057 704	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Pras.Irigasi,Danau & Rawa	S1	-	-	45

61	Fitria Nur Sarie, ST 824 058 104	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	40
62	Hendra Mianata, A.Md 848 058 104	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Pras.Irigasi,Danau & Rawa	D-III	-	-	40
63	M. Taufik Amrullah, ST 101 81 08	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	41
64	Fanny Yudhadinata,ST 157 81 08	Pengelola Teknis Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	41
65	Noorlianty,ST 256 77 09	Pengelola Kegiatan Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	45
66	Linda Nuvita Rini,ST 136 84 10	Pengelola Kegiatan Seksi Pemel.Jalan&Jembatan	S1	-	-	38
67	Selamet Heru Widodo,ST 045 80 09	Pengelola Kegiatan Seksi Pemb.Usaha Jasa Konst.	S1	-	-	42
68	Risa Wisdayanti,SE 113 84 08	Pengelola Kegiatan Seksi Pemel.Peralatan&Uji Mutu	S1	-	-	38
69	Linda Ariani 050 85 08	Operator Komputer Subbag Umpeg	SLTA	-	-	37
70	Yenny Marlina,ST 053 84 08	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Perkim&Gedung	S1	-	-	38
71	Akhmad Riza Ramadhan, A.md 007 88 10	Pengelola Teknis Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	D-III	-	-	34
72	Tri Bahagia Ningrum 052 89 08	Pengelola Kegiatan Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	SLTA	-	-	33
73	Ramadhani Taufiqurrahman 274 84 09	Operator Alat Berat Seksi Pemel.Peralatan&Uji Mutu	SLTA	-	-	38
74	Ustien Anaina Maria, SE, MT 420 76 09	Tenaga Administrasi Seksi Perenc.&Penataan Ruang	S2	-	-	46
75	Annajah 078 87 09	Tenaga Administrasi Seksi Perenc.&Penataan Ruang	SLTA	-	-	35
76	Tasya Rizkita Amalinda, S.Ars 05.92.18.02	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Subbag Perencanaan	S1	-	-	30
77	Gt.M.Fakhruriza R., A.Md 15.94.18.03	Tenaga Administrasi Subbag Keuangan	D-III	-	-	28
78	M. Ferry Noviyandi, S.Kom 05.94.22.17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbag Perencanaan	S1	-	-	28

79	M. Aprianor 05.98.21.11	Tenaga Administrasi Subbag Umpeg	SLTA	-	-	24
80	Ana Noviana, ST 15.87.19.04	Tenaga Administrasi Seksi Pemb.Jalan & Jembatan	S1	-	-	35
81	M. Farkhan Abidillah, S.PWK 005.92.19	Pengelola Teknis Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Evaluasi tata Ruang Bid.Cipta Karya	S1	-	-	30
82	Ahlia, Amd 05.74.20.09	Administrasi Umum Subbag Umpeg	D-III	-	-	48
83	Fauzi Alvi, S. Ars 05.93.19.05	Tenaga Teknis Seksi Air Bersih&Penyehatan Lingk.	S1	-	-	29
84	Rissa Saftiranti, SKM 05.88.19.06	Pengadministrasian Umum Seksi Air Bersih&Penyehatan Lingk.	S1	-	-	34
85	M. Naufal Firdaus 05.01.19.07	Tenaga Teknis Seksi Perenc.&Penataan Ruang	SLTA	-	-	21
86	M. Rizkian Noor, ST 05.92.21.10	Tenaga Teknis Seksi Pengemb.Pras.Sungai & Waduk	S1	-	-	30
87	Husna Nadhira Awfiyaa, ST 05. 92. 21. 14	Tenaga Administrasi Seksi Pengembangan Prasarana irigasi, Danau dan Rawa	S1	-	-	30
88	Diyaul Lubaba 05.00.21.13	Pembantu Administrasi Aset Subbag Umpeg	SLTA	-	-	22
89	Nur Azmia 05.04.22.30	Tenaga Administrasi Subbag Umpeg	SLTA	-	-	18
90	Danar Jovian Aji Ogantara, Amd 05.96.22.18	Pengelola Kegiatan Seksi Peralatan dan Uji Mutu Bidang Pengem. Konstruksi	D-III	-	-	26
91	Melda Sari, SKM 05.97.22.21	Tenaga Administrasi Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	S1	-	-	25
92	Jaya Raya, Amd 05.74.22.20	Caraka pada Dinas PUPR Kota Banjarbaru	D-III	-	-	48
93	M. Rifqi Arrahimi 05.03.22.19	Tenaga Administrasi Subbag Umpeg	SLTA	-	-	19

94	Syarifah Silvira Faridha 05.97.22.22	Operator IPLT	SLTA	- -	- -	25
95	Aulia Rahmah 05.96.22.23	Operator IPLT	S1	- -	- -	26
96	Muhammad Rizki Ramadhoni 05.95.22.25	Operator IPLT	SLTA	- -	- -	27
97	Nova Hermanto 05.84.22.24	Operator IPLT	S1	- -	- -	38
98	Rafika Arie 05.80.22.26	Administrasi IPLT	S1	- -	- -	42
99	Anita Marianti, SP 05.81.22.27	Administrasi IPLT	S1	- -	- -	41
100	Sobhan Fahrian	Pekerja IPLT	SLTA	- -	- -	44
101	Didik Heru Utomo	Pekerja IPLT	SLTA	- -	- -	55
102	Muhammad Hasbi	Pekerja IPLT	SLTA	- -	- -	46
103	Alghipari	Pekerja IPLT	SLTA	- -	- -	18
104	Hidayat Effendi	Pekerja IPLT	SLTA	- -	- -	45
105	Hidayat Rahmatullah	Sopir IPLT	SLTA	-	-	45
106	Muhammad Maulana	Sopir IPLT	SLTA	-	-	29

BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengacu pada Misi Kota Banjarbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu :

- Misi I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
- Misi II : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
- Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.
- b. Menurunkan Angka Stunting.
- c. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Berkualitas.

2. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah Jangka Menengah (5 tahun) kedepan.

Berdasarkan uraian diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan beberapa sasaran yang relevan dengan Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- c. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- d. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- e. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- f. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung.
- g. Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.
- h. Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi.
- i. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. *Bidang Bina Marga.*
 - Meningkatkan Tingkat Kemantapan Jalan Kota dan Bangunan Pelengkap Jalan.
 - Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah di Kota Banjarbaru.
 - Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota Yang Berkualitas.

b. *Bidang Cipta Karya.*

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Lingkungan Yang Berkualitas.
- Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Baik dan Merata.
- Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.
- Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik.

c. *Bidang Sumber Daya Air*

- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.

d. *Bidang Pembinaan Konstruksi*

- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.

e. *Bidang Tata Ruang*

- Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Yang Konsisten.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :

- a. Melakukan pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi program-program pembangunan
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
- c. Meningkatkan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.

- d. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi.
- f. Meningkatkan Kerjasama dan penyertaan modal dalam pipanisasi.
- g. Meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih dan sehat tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
- h. Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi yang telah terbangun.
- i. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- j. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi.
- k. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- l. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan yang merata, aman, dan bewawasan lingkungan.
- m. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang tata ruang.
- n. Penyusunan rencana tata ruang beserta revisinya.
- o. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Renstra Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022, terdiri dari :

- * 11 (sebelas) Program;
- * 20 (dua puluh) Kegiatan; dan
- * 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan

Dari 11 (sebelas) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan tersebut apabila dijelaskan lebih rinci menjadi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
- 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
 - a. **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.**
 - 1) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
 - a. **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
5. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
 - a. **Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
6. **Program Pengembangan Pemukiman**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
7. **Program Penataan Bangunan Gedung**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

8. **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
9. **Program Penyelenggaraan Jalan**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - 2) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 6) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
10. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - b. **Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
11. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
 - a. **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - b. **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - c. **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel. 4
Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	SEKRETARIAT
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	
	Meningkatnya nilai AKIP SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan undang-undangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	58 Orang	
	Meningkatnya penatausahaan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan keuangan SKPD	1 Laporan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
	Aset DPUPR sesuai dengan perundang-undangan	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Laporan	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Baik	
	Meningkatnya penatausahaan kepegawaian	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	4 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Buah	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	12 Buku	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	12 Lembar	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	12 Buah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	120 Laporan	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	40 Buah	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	13 Unit	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	17 Buah	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	4 Jenis	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif Jasa pelayanan umum kantor lainnya	4 Orang	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/ Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	16 Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Paket	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	
Meningkat Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	35.24%	SUMBER DAYA AIR
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat			Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69.35%	
	Berkurangnya permasalahan rawan banjir	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	35.24%	
	Panjang Tebing dan tanggul Sungai yang ditingkatkan dengan pemasangan siring dinding penahan tanah dan urugan tanah, panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya dengan normalisasi, serta Infrastruktur pengendali banjir	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya yang ditingkatkan (m)	1.612,5 m	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara (m)	8.289 m	
		Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun (buah)	1 Buah	
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara (buah)	-	
	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	69.35%	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
		Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Infrastruktur Irigasi dalam Keadaan Baik	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	2 Buah	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi	452,56 Ha	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang dipelihara	358 Ha	
Menurunnya Angka Stunting	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	97.70%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	97.70%	
	Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Air Minum yang dibangun	2.000 m	
Menurunnya Angka Stunting	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100%	CIPTA KARYA

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100%	
	Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pelayanan dan pengelolaan IPLT yang ditingkatkan	100%	
	Meningkatnya jumlah KK yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun	270 KK	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	59.85%	BINA MARGA dan CIPTA KARYA
	Meningkatnya infrastruktur saluran drainase jalan kota yang berkualitas	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	53.23%	BINA MARGA
	Meningkatnya sistem jaringan Drainase lingkungan dalam kondisi baik		Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	66.46%	CIPTA KARYA
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang dibangun	1.000 m	BINA MARGA
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang ditingkatkan	395 m	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara	7.523 m	
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi	6.306 m	CIPTA KARYA
		Penyediaan Sarana Sistem	Panjang saluran drainase jalan	4.768 m	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
		Drainase Lingkungan	lingkungan yang ditingkatkan		
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis.	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	87.06%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	87.06%	
	Meningkatnya panjang Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan	17.980 m	
			Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	6.572,62 m	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	
	Meningkatnya jumlah gedung kantor dan sarana publik dalam kondisi baik	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun	1 Unit	
			Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dipelihara	4 Unit	
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	
	Meningkatnya sarana publik dalam kondisi baik	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik	2 unit	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	81.32%	BINA MARGA
	Meningkatnya tingkat kemantapan jalan kota dan bangunan pelengkap jalan Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Banjarbaru	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	82.11%	
			Persentase jalan kota yang terbangun	5.08%	
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	Pembangunan Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun	4.978 m	
	Terlaksananya rekonstruksi jalan kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kota yang ditingkatkan	8.710 m	
			Panjang jalan kota yang dibangun trotoar	1.000 m	
			Jembatan penyeberangan pejalan kaki yang dibangun	25 m	
	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	2.333 m	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	830 m	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	3.708 m	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan kota	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	6 m	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	PENGEMBANGAN KONSTRUKSI
	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	100%	
	Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	7 Layanan	
	Meningkatnya paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	
	Terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 paket	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2022)	
				Target	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggara nya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	70.00%	TATA RUANG
	Meningkatnya tertib perencanaan tata ruang kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	25%	
	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan	2 Dok	
	Tersusunnya dokumen teknis Rencana Tata Ruang (RTR)	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun	5 Dok	
	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	
	Terselesaikan nya perizinan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dari pemohon izin	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan	100%	
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100%	
	Bertambahnya lokasi perizinan yang sesuai dengan perizinan dan peruntukan ruangnya	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah lokasi perizinan yang dievaluasi kesesuaian perizinan dan peruntukan ruangnya	50 lokasi	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		48,76 Ha
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		90,922 m
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		Ada
6		Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		59.013 m
1	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		48,76 Ha
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		90,922 m
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada	
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota		Ada	
6		Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada	
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		59.013 m	
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer (m)}} \times 100 \%$	$\frac{17.963}{25.300} \times 100\%$	71%
2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder (m)}} \times 100 \%$	$\frac{73.247}{134.381} \times 100\%$	55%
3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier (m)}} \times 100 \%$	$\frac{43.785}{60.824} \times 100\%$	72%

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota		Tidak Ada
2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten/kota		Tidak Ada
3		Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM		1 Perusahaan
4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Tidak Ada
5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain		Tidak Ada
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		56.305 rumah
2		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T		8.383 rumah
3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		64.688 rumah

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		51 rumah	
5		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		51 rumah	
6		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		8.383 rumah	
7		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/tangki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	$\frac{56.305}{64.688} \times 100\%$	87,04 %
8		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	$\frac{8.383}{64.688} \times 100\%$	12,96 %
9		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100 \%$	$\frac{8.383}{64.688} \times 100\%$	12,96 %
10		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	$\frac{56.305}{64.688} \times 100\%$	87,04 %
11		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kota}} \times 100\%$	$\frac{2 \text{ buah}}{3 \text{ buah}} \times 100\%$	66,67 %

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
12	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kota}} \times 100\%$	$\frac{20 \text{ m}^3}{100 \text{ m}^3} \times 100\%$	20 %
13		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kota}} \times 100\%$	$\frac{152}{8.383} \times 100\%$	1,81 %
14		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	$\frac{51}{64.688} \times 100\%$	0,08 %
1	Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana}} \times 100 \%$	$\frac{6}{97} \times 100\% = 6,19\%$	
2		Jumlah PBG yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting		296 buah	
3		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung	
4		Penetapan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Yang ada hanya untuk SK TPA Bangunan Gedung (SK Wali Kota Nomor : 188.45/136/KUM/2022, tanggal 11 April 2022)	

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
5	Rasio Kepatuhan PBG Kota	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Tidak Ada
6		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Tidak Ada
7		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota		64 Buah
8		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		64 Buah
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota		1.123,434 Km
2		Panjang jalan yang dibangun		1.636 m
3		Panjang jembatan yang dibangun		0 m
4		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		34.585,64 m
5		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0 m
6		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		3.163 m
7		Panjang jembatan yang direhabilitasi		6 m
8		Panjang jalan yang dipelihara		3.708 m
9		Panjang jembatan yang dipelihara		6 Buah

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
1	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		1 Kali Pelatihan
2		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		25 orang
3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		39 orang
4		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada
5		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota		Ada
6		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Tidak Ada
7		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Tidak Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
8	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada
9		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota		Ada
10		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada
11		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada
12		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
13	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota		Ada
14		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Tidak Ada
15		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada
16		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada
17		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
18	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kota		Tidak Ada
19		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota		Tidak Ada
20		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota		Tidak Ada
21		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota		Ada
22		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Tidak Ada
23		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		70 Perusahaan

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
24		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada
25		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		70 Perusahaan
1	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		$\frac{\text{Jumlah Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah Total Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	0%

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Hasil dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)}} \times 100\%$	$\frac{28,92 \text{ ha}}{48,76 \text{ ha}} \times 100\%$	59,31 %
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)				
	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				
	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota				
	Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota				
	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota				
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0,00%
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)				
	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				
	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota				
	Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota				
	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota				
3	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kota}} \times 100\%$	$\frac{2.021,5 \text{ Ha}}{5.700 \text{ Ha}} \times 100\%$	35,46 %
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik				
	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
4	Pemenuhan dokumen RISPAM kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	$\frac{\text{Jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota tersebut}} \times 100\%$	$\frac{12.782 + 50.881}{64.688} \times 100\%$	98,42 %
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kota				
	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain				
5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kota}} \times 100\%$	$\frac{56.305 + 8.383}{64.688} \times 100\%$	100%
	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD- T	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja				
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja				
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman				
	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				
	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja				
	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD				
	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				
6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Rasio Kepatuhan PBG Kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} \times 100\%$	$\frac{296}{296} \times 100\% = 100\%$	100%
	Jumlah PBG yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam tahun eksisting				
	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung				
	Penetapan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan				
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi				
	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota				
	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat				
7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK jalan kewenangan Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kota yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{(469,33 + 494,63) \text{ Km}}{(555,275 + 568,159) \text{ Km}} \times 100\%$	85,80 %
	Panjang jalan yang dibangun				
	Panjang jembatan yang dibangun				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)				
	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan				
	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi				
	Panjang jembatan yang direhabilitasi				
	Panjang jalan yang dipelihara				
	Panjang jembatan yang dipelihara				
8	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kota	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis/Analisis di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{39 \text{ orang}}{280 \text{ orang}} \times 100\%$	13,92 %
	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota				
	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kota				
	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota				
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN				
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya				
	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian
	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu poin yang dikoreksi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Adalah perubahan terkait prosedur Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dihapuskan atau sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan tentang jasa konstruksi lainnya sejak tanggal 30 Juli 2021.

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kota				
	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota				
	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kota				
	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota				
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota				
	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota				
	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
9		Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangannya pengawasannya}} \times 100\%$	0%	

BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

----- Nihil -----

BAB V

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Pada Tahun 2019, mengalami perubahan regulasi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan dasar untuk Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada tabelberikut ini :

Tabel. 6
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional Tahun 2022
I.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 ada dua Indikator dari target Nasional, yaitu :

1

Jenis Pelayanan Dasar:

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Indikator		Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2022	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2022	Target Nasional s/d Tahun 2022
I.	1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	97,70 %	98,42 %	100,00%

2

Jenis Pelayanan Dasar:

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah

No	Indikator		Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2022	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2022	Target Nasional s/d Tahun 2022
I.	1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100,00 %	100,00%

B. ALOKASI ANGGARAN

Adapun rencana anggaran untuk tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 8.460.170.000** ,-. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 7
Alokasi Rencana Anggaran
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Indikator		Program	Perhitungan Rencana Biaya Tahun 2022
I	1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.394.892.000,-

		terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota		
	2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.065.278.000,-

C. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai Tahun 2022 sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	6	Orang
Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak	:	1	Orang
Dengan Posisi / Jabatan sebagai berikut			
Kepala Dinas (ess. II b)	:	1	Orang
Sekretaris (ess. III a)	:	1	Orang
Kepala Bidang (ess. III b)	:	1	Orang
Kasubag/Kasi (ess. IV a)	:	1	Orang
Staf PNS/PTT/Tenaga Kontrak	:	3	Orang

D. PERMASALAHAN SOLUSI

SPM Bidang Air Minum belum mencapai target karena dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru hanya 78.66% (50.881 KK) yang memperoleh akses air minum aman, atau dalam hal ini mereka adalah masyarakat yang terlayani oleh jaringan pipa PDAM. Akses air minum aman (*safely managed*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan amanat *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di luar rumah (*on-premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan data BPS, 19,76% (12.788 KK) dari total jumlah KK yang tersebar di 5 kecamatan dilayani oleh akses air minum berupa akses layak terbatas dan akses layak dasar.

Akses layak terbatas (*limited access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah > atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Sedangkan akses layak dasar adalah (*basic access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah < atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Total capaian SPM Bidang Air Minum sampai dengan semester II Tahun 2022 adalah sebesar 98,42%, yang artinya terdapat 1,58% jumlah KK se Kota Banjarbaru (1.022 KK) yang belum memiliki akses layak. Berdasarkan data BPS, masyarakat ini menggunakan mata air tak terlindung dan air permukaan seperti sungai, kolam, danau/waduk dan irigasi.

Adapun total persentase jumlah KK yang harus terlayani akses air minum aman sampai tahun 2024 adalah sebesar 21,34% dari 5 kecamatan, dengan target prosentase terbesar berada di Kecamatan Cempaka sebesar 48,87%.

Target SPM Bidang Air Minum dengan akses aman 100% dan akses layak 0% merupakan target yang harus dicapai oleh Kota Banjarbaru, berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pencapaian Target SPM yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Salah satu kendala dalam pencapaian target akses air minum 100% adalah tidak semua masyarakat Kota Banjarbaru bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum. Beberapa penyebabnya antara lain masih kurang tercemarnya air sumur dangkal yang digunakan sebagai air minum, selain itu air tanah cenderung lebih mudah didapatkan melalui sumur gali dan pada saat musim kering, tidak semua sumur gali mengalami kekeringan, sehingga jaringan PDAM hanya dijadikan opsi cadangan dalam memperoleh air minum.

Di beberapa tempat seperti di Kecamatan Cempaka, sebagaimana berdasarkan data sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) banyak terdapat di 4 kelurahan pada Kecamatan dimaksud yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sumur gali sebagai sumber air minum utama dan kegiatan sehari-hari adalah lebih kepada faktor ketidakmampuan

mereka untuk membayar biaya berlangganan PDAM setiap bulannya, ini Padahal air sumur yang digunakan cukup tercemar, dalam hal ini pada musim kering, air cukup keruh dan berbau.

Oleh karenanya, agar akses air minum aman dapat tercapai 100% pada tahun 2024 mendatang, salah satu solusinya adalah melalui pencapaian akses air minum aman baik dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat maupun penyediaan akses air minum aman berupa sumur bor dalam atau sumur dangkal tertutup yang dialirkan dari sumur bor berspesifikasi khusus dan sesuai dengan Permenkes No.49/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Aliran air sumur-sumur ini diharapkan dapat kurang dari 30 menit sampai ke Sambungan Rumah (SR) warga pemanfaat, sehingga *eligibility* akses air minum aman dapat tercapai di lokasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan SPM Tahun 2022, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian dua Indikator SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2022 terdapat satu indikator yang belum mencapai target nasional dikarenakan oleh :

- Layanan PDAM dengan sistem pembayaran berlangganan kurang diminati oleh masyarakat daerah Cempaka, karena sebagian besar penduduknya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan kawasan tersebut sebagian besar kawasan permukiman padat penduduk; Usaha meminimalkan hal diatas kiranya perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat lebih lanjut serta intervensi pemerintah dalam penyediaan akses air minum aman untuk masyarakat, sehingga diperlukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya, dan diharapkan target akan tercapai secara maksimal.

Dengan disusunnya laporan tahunan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian visi SKPD selain itu laporan tahunan ini sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diharapkan menjadi salah satu SKPD andalan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan dimasa mendatang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. SARAN

Pelaksanaan Kinerja Dinas pada Tahun Anggaran 2022, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang diperlukan strategi dan intervensi baik berupa pemberian pemahaman terhadap masyarakat dimaksud serta melibatkan beberapa stake holder serta peningkatan kapasitas SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan melalui rapat koordinasi.

Banjarbaru, Februari 2023
Kepala Dinas

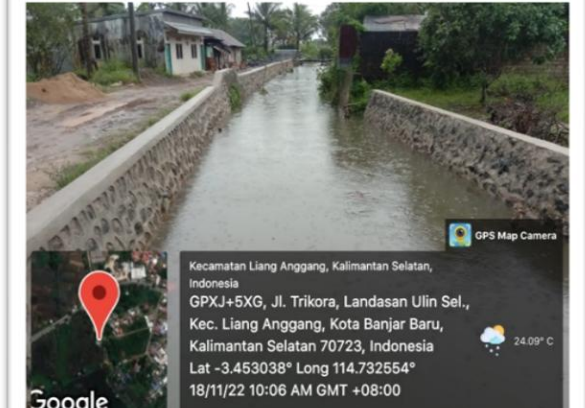
EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730727 199803 2 008

LAMPIRAN FOTO VISUAL KEGIATAN

FOTO KEGIATAN BIDANG SUMBER DAYA AIR TA. 2022

Kegiatan Peningkatan Sungai Pulantan Segmen 2 (Paket 4)

Program	:	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	:	Pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Tanggul Sungai
Pekerjaan	:	Peningkatan Sungai Pulantan Segmen 2
Lokasi	:	Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang
No Kontrak	:	610/02/SP/PTS-04/DPU&PR/VI/2022
Tanggal Kontrak	:	8 Juni 2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 2.482.165.000,00
Nilai Addendum 1	:	Rp. 2.504.730.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
Pelaksana	:	CV. RAKEDOV KONSTRUKSI INDONESIA
Konsultan Pengawas	:	CV. SEMBILAN DUA TEKNIK KONSULTAN



Pembuatan Bangunan Air Di. Peramuan Kel. Landasan Ulin Tengah



FOTO KEGIATAN BIDANG BINA MARGA TAHUN 2022

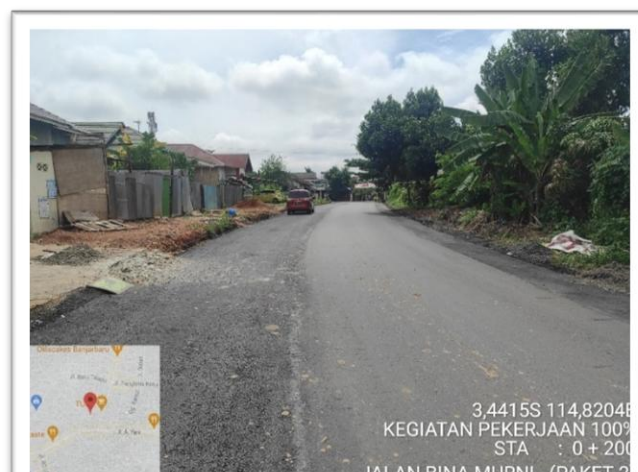
1. PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JL. PONDOK YASIN KEL.

GUNTUNG MANGGIS

Program	: Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) T.A 2022
Pekerjaan	: Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jl. Pondok Yasin Kel. Guntung Manggis (Paket.1) (DAK Reguler)
Lokasi	: Jl. Pondok Yasin Kel. Guntung Manggis
No Kontrak	: 621/02/SP/REHAB.HAR.JL-1/DAK/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	: 19 Mei 2022
Nilai Kontrak	: Rp 1.565.729.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 150 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	: 180 Hari Kalender
Pelaksana	: CV. WIRA KARYA PRATAMA



Program	: Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jalan
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jalan Gotong Royong 3 (Kel. Mentaos), Jalan Pondok Labu (Kel. Loktabat Utara), Jalan Bina Murni dan Jalan Pancasetia (Kel. Loktabat Utara) (Paket.2)
Lokasi	: Kelurahan Mentaos dan Loktabat Utara
No Kontrak	: 621/02/SP/REHAB.JL-2/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	: 19 Mei 2022
Nilai Kontrak	: Rp. 2.375.000.000,00
Nilai Adendum 1	: Rp 2.396.590.000,00
Waktu Pelaksanaan	: 150 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	: 180 Hari Kalender
Pelaksana	: CV. GUNUNG WILIS





Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Pekerjaan	: Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bina Karya (Kel. Kemuning), dan Jl. Zam-zam Zailani (Kel. Kemuning) (Paket.1)
Lokasi	: Kelurahan Kemuning
No Kontrak	: 621/02/SP/PENINGKATAN.SDP-1/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	: 31 Mei 2022
Nilai Kontrak	: Rp. 1.427.437.000,00
Adendum	: Rp. 1.440.413.000,00
Waktu Pelaksanaan	: 180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	: 180 Hari Kalender
Pelaksana	: CV. PRIMA TEKNIK KONSTRUKSI





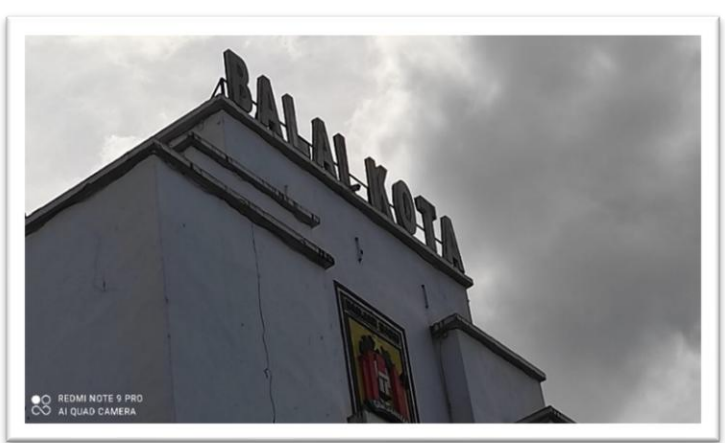
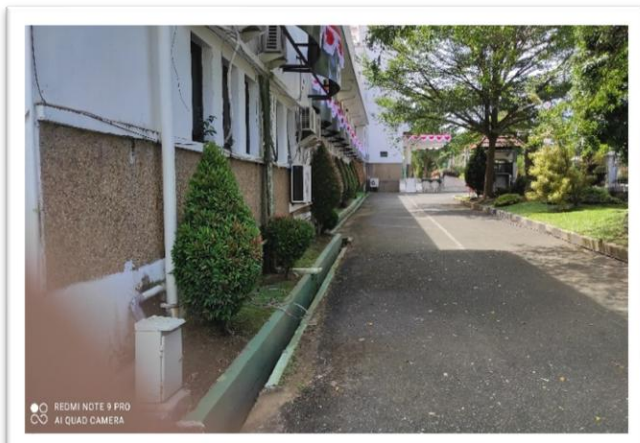
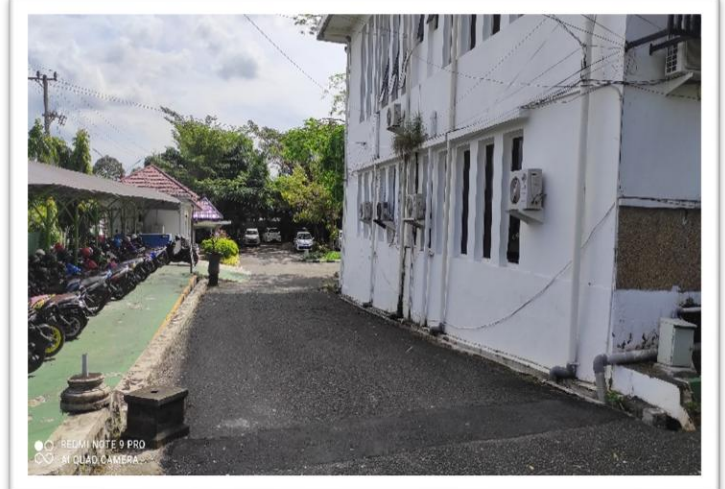
Program	: Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan	: Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Jalan A. Yani Km. Bjm 34+000 (Paket 2)
Lokasi	: Kota Banjarbaru
No Kontrak	: 621/02/SP/REKON.JL-2(JPO)/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	: 1 Juli 2022
Nilai Kontrak	: Rp. 4.798.669.000,00
Nilai Addendum Kontrak	: Rp. 4.999.953.000,00
Waktu Pelaksanaan	: 180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	: 180 Hari Kalender
Pelaksana	: CV. TIGA JAYA GROUP





FOTO KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2022

Program	: Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan	: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Renovasi Fasad Gedung Balai Kota Pemerintah Kota Banjarbaru
Lokasi	: Kota Banjarbaru
No Kontrak	: 641/03/SP/FASAD/P4GDK/CK/DPUPR/2022
Tanggal Kontrak	: 29 Agustus 2022
Nilai Kontrak	: Rp. 1.874.778.000,00
Nilai Adendum 1	: Rp. 2.010.134.000,00
Waktu Pelaksanaan	: 180 Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	: 180 Hari Kalender
Pelaksana	: CV. BANGALI JAYA BAROKAH







Program : **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Pekerjaan : Pengembangan Jaringan Distribusi & Sambungan Rumah Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang (100 Sr)

Lokasi : Jalan Lingkar Utara

Pelaksana : CV. MITRA BONANZA



Program : **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 Pekerjaan : Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan
 Lokasi : Kota Banjarbaru
 Tanggal Kontrak : 29 Agustus 2022
 Nilai Kontrak : Rp. 349.784.000,00
 Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
 Waktu Pemeliharaan : 180 Hari Kalender
 Pelaksana : KSM SEKATA

